



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021 - 2022
21 - 25 FEBRUARI 2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2022**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, dan Investasi melakukan kunjungan kerja ke daerah guna mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2021 – 2022, Komisi VI DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 25 Februari 2022.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, kinerja beberapa BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Secara khusus, kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan (*food security*) nasional khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut melalui Sistem Resi Gudang.

C. Objek Kunjungan Kerja

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Reses tersebut, beberapa pihak yang akan terlibat antara lain:

1. Beberapa Kementerian/Lembaga terkait antara lain :
 - a. Kementerian Perdagangan
 - b. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
2. Beberapa BUMN (Termasuk Anak Perusahaan BUMN) antara lain :
 - a. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
 - b. PT Jaminan Kredit Indonesia

- c. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- d. PT Sucofindo (Persero)
- e. Perum Bulog
- f. PT Perkebunan Nusantara XIII

D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-327	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.	PIMP./F. GOLKAR
2.	A-232	I NYOMAN PARTA, S.H.	F.PDIP
3.	A-251	Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.	F.PDIP
4.	A-274	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA	F.PG
5.	A-311	DONI AKBAR, S.E.	F.PG
6.	A-335	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H.	F.PG
7.	A-292	Ir. Moh. ICHSAN FIRDAUS	F.PG
8.	A-94	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA.	F.GERINDRA
9.	A-11	TOMMY KURNIAWAN	F.PKB
10.	A-16	Drs. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si	F.PKB
11.	A-544	DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	F.PD
12.	A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	F.PKS
13.	A-409	RAFLI	F.PKS
14.	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F.PAN
15.	A-500	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.	F.PAN
16.	A-463	ELLY RACHMAT YASIN	F.PPP

II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi dua sesi. Beberapa informasi yang disampaikan oleh mitra kerja Komisi VI DPR RI pada saat kunjungan kerja reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021/2022 ke Provinsi Kalimantan Selatan secara terperinci sebagai berikut :

A. SESI I

Tanggal Pertemuan	21 Februari 2022
Lokasi	Ballroom, Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin Kalimantan Selatan
Pimpinan Rapat	Gde Sumarjaya Linggih (Pimpinan Komisi VI DPR RI)
Mitra yang Hadir	<ol style="list-style-type: none">1. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar Kementerian Perdagangan, Bapak Sutriyono Edi;2. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), bu Widiastuti;3. Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN, Bapak Muhammad Khoerur Roziqin;4. Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Bapak Fajar Wibhiyadi, beserta jajaran;5. Direktur Bisnis Penjaminan PT Jaminan Kredit Indonesia, Bapak Suwarsito, beserta jajaran;6. Direktur Wholesale and Transaction Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk., Bapak Kusman Yandi, beserta jajaran;
Tema	Ketahanan Pangan dan Strategi Peningkatannya Melalui Sistem Resi Gudang

Sektor pangan merupakan salah satu sektor yang sangat vital karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemenuhan ketersediaan pangan yang cukup, aman, berkualitas serta dengan harga yang terjangkau menjadi sangat penting seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan nasional menjadi prioritas pemerintah untuk dapat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Selain melalui peningkatan kapasitas produksi pangan, ketahanan pangan nasional juga perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem distribusi sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah tanah air serta implementasi kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan dengan baik sehingga bahan pangan pokok yang berkualitas dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu

instrumen yang dapat mendukung peningkatan ketahanan pangan khususnya di sisi rantai pasok adalah Sistem Resi Gudang.

Implementasi Sistem Resi Gudang yang baik dinilai dapat mendukung ketersediaan komoditas pangan secara berkesinambungan sepanjang tahun sekaligus berdampak pada stabilisasi harga komoditas pangan. Selain itu, implementasi sistem resi gudang ini juga mampu mendukung kinerja serta *cashflow* para petani dan pelaku usaha di sektor pangan melalui peluang pembiayaan oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Namun demikian, implementasi Sistem Resi Gudang di Indonesia dinilai masih belum optimal dan memiliki banyak tantangan sehingga penggunaannya belum dilakukan secara meluas di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pertemuan, beberapa mitra menyampaikan perkembangan kinerja serta kontribusi perusahaan terhadap sektor pangan nasional khususnya melalui implementasi Sistem Resi Gudang yang terinci sebagai berikut.

Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Beberapa hal yang disampaikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) antara lain:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan salah satu unit Eselon I Kementerian Perdagangan. Tugas pokok dan fungsi Bappebti adalah melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang.
2. Data penerbitan Resi Gudang serta pembiayaannya selama 4 tahun terakhir sebagai berikut :

Tahun	Penerbitan RG (Rp. M)	Pembiayaan RG (Rp. M)	Jenis Komoditas
2018	99,96	52,52	Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Lada, Rumput Laut
2019	111,24	63,82	Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Lada, Rumput Laut, Garam
2020	191,21	117,72	Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Lada, Rumput Laut, Timah, Ikan
2021	515,77	355,30	Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Lada, Rumput Laut, Timah, Ikan, Kedelai, Gambir

3. Terkait dengan gudang pengelola SRG, terdapat total 105 gudang pengelola SRG dengan rincian:
 - a. 3 gudang dikelola oleh BUMN
 - b. 13 gudang dikelola oleh BUMD
 - c. 59 gudang dikelola oleh koperasi dan
 - d. 30 gudang dikelola oleh swasta

Dari jumlah tersebut, terdapat 47 gudang yang aktif menerbitkan resi gudang sepanjang 2021-2022 dan terdapat 17 pengelola gudang yang belum pernah menerbitkan resi gudang sejak diberikan izin oleh Bappebti.

4. Pelaksanaan SRG di Kalimantan Selatan telah berjalan sejak tahun 2010, berawal dari kabupaten Barito Kuala kemudian meluas ke Kabupaten Tapin. Saat ini, terdapat 4 gudang SRG yang terdiri dari 2 gudang di Kabupaten Barito Kuala dan 2 gudang di Kabupaten Tapin. Gudang tersebut tidak hanya milik Pemerintah Daerah namun juga gudang milik swasta.
5. Terkait dengan pertumbuhan transaksi Resi Gudang, kenaikan yang signifikan pada pembiayaan tahun 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh nilai transaksi komoditas Timah yang masing-masing sebesar Rp. 55,79 Miliar dan Rp. 313,7 Miliar dengan nilai pembiayaan masing-masing sebesar Rp. 39,52 Miliar dan Rp. 242,45 Miliar.
6. Penurunan nilai transaksi SRG di tahun 2021 disebabkan oleh terhentinya pembiayaan SRG di Provinsi Aceh setelah efektif menerapkan Qanun dimana pembiayaan wajib menggunakan sistem syariah. Beban margin yang tinggi pada skema syariah di Provinsi Aceh menyebabkan penurunan nilai penerbitan SRG hingga 80%.
7. Tantangan dalam implementasi SRG adalah sebagai berikut :
 - a. Belum berfungsinya lembaga penjamin SRG.
 - b. Sulitnya mencari calon pengelola gudang SRG lokal yang berkompeten.
 - c. Minimnya sarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan SRG seperti sarana angkut, *dryer*, RMU dll.
 - d. Belum tersedianya lembaga dalam ekosistem SRG di sekitar lokasi gudang seperti LPK Uji Mutu, Lembaga Keuangan, Lembaga Asuransi dll.
 - e. Kurangnya dukungan Pemda baik dalam hal penyiapan kelembagaan SRG maupun pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan SRG.
 - f. Pemda belum memiliki ketentuan baku terkait pola/pemanfaatan gudang sebagai aset daerah oleh pihak ketiga.
8. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain :
 - a. Akselerasi revisi regulasi SRG antara lain terkait Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dan Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG.
 - b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan SRG serta penetapan/penunjukan calon pengelola gudang yang berkompeten.
 - c. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Fasilitas pembiayaan dengan mekanisme SRG (LPDP Kemenkop, PKBL BUMN dan Kemenkeu untuk subsidi SRG).
 - Pembinaan calon pengelola gudang dan pengelola gudang SRG (Kemenkop UKM).

- Memasukkan klausul alokasi anggaran untuk pengembangan SRG ke dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (Kemendagri).
 - Membentuk Tim Kelompok Kerja yang beranggotakan K/L dan *stakeholders* terkait untuk akselerasi implementasi SRG melalui sinergi program kerja/kegiatan.
- d. Berkoordinasi dengan asosiasi dan BUMN (APRINDO dan PT RNI) dalam rangka menciptakan akses pasar yang lebih luas dan potensi menjadikan Pengelola Gudang SRG.

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau selanjutnya disingkat KBI antara lain :

1. KBI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI. KBI bergerak di beberapa bidang yaitu Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Fisik Komoditas.
2. Pendapatan operasional di tahun 2021 mencapai Rp. 189,55 Miliar atau meningkat sebesar 23,03% dari pendapatan di tahun 2020 dimana pendapatan dari registrasi resi gudang mencapai Rp. 2,32 Miliar. Sementara itu laba bersih KBI tahun 2021 mencapai Rp 101,64 Miliar atau meningkat sebesar 53% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya.
3. Pendapatan dan laba bersih KBI tersebut mengalami pertumbuhan setiap tahun. Selain itu, dalam pendapatan operasional tersebut terdapat pendapatan operasional yang berasal dari aktivitas pusat registrasi resi gudang dan kegiatan lainnya.
4. Sesuai UU No. 09 Tahun 2011, KBI merupakan pihak yang ditunjuk sebagai pusat registrasi atau Pusreg Resi Gudang dimana beberapa fungsinya antara lain pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.
5. Untuk kawasan Kalimantan Selatan, Resi Gudang yang diterbitkan terdapat kenaikan dan penurunan setiap tahunnya dari tahun 2017 sd Februari 2022. Penerbitan Resi Gudang melalui :
 - a. Dua koperasi sebagai pengelola gudang antara lain
 - Koperasi Basunondo (aktif)
 - KUD Penerus Baru (belum aktif)
 - b. Empat gudang antara lain
 - Gudang Mandastana (aktif)
 - Gudang Anjir Muara (aktif)
 - Gudang Tapin (belum aktif)
 - Gudang Penerus Baru (belum aktif)
 - c. Komoditas yang diterbitkan adalah gabah.

6. KBI juga berpartisipasi dalam pembiayaan SRG dengan model pembiayaan antara lain :
 - a. Subsidi Sistem Resi Gudang
 - b. Bunga Komersial
 - c. Pembiayaan Syariah
 - d. Sistem Repo Resi Gudang
7. Pembiayaan dilakukan oleh TJSL KBI kepada para pemilik barang yang menyimpan barangnya di gudang dan diterbitkan Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan barang.

PT Jamkrindo

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Jamkrindo antara lain :

1. Jamkrindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penjaminan baik secara finansial maupun non finansial, guna mengatasi permasalahan kekurangan agunan.
2. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, Jamkrindo dapat menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dengan rincian data sbb :

Indikator	2020	2021	Keterangan
Asset (Rp. Miliar)	19.122	27.753	Naik
Pendapatan Penjaminan (Rp. Miliar)	3.199	5.333	Naik
Laba Tahun Berjalan (Rp. Miliar)	545	641	Naik

3. Sementara itu, pencapaian kinerja Jamkrindo di Kalimantan Selatan (Kanwil Banjarmasin) ditunjukkan pada tabel sebagai berikut

Indikator	2020	2021	Keterangan
Asset (Rp. Miliar)	678	669	Naik
Pendapatan Penjaminan (Rp. Miliar)	147	226	Naik
Laba Tahun Berjalan (Rp. Miliar)	101	46	Naik

4. Terkait pembentukan holding BUMN Jasa Asuransi (IFG), beberapa dampak positif yang dirasakan oleh Jamkrindo antara lain :
 - a. Perbaikan tata kelola perusahaan.
 - b. Perbaikan TC kerjasama dengan mitra.
 - c. Peningkatan Bargaining Position pada saat negosiasi dengan mitra.
 - d. Sinergi penjaminan dengan asuransi anggota *holding*.
 - e. Kapasitas penjaminan yang bisa dilakukan semakin lebar dan luas.
 - f. Memperkuat brand image perusahaan.
5. Volume penjaminan selama periode tahun 2021 mencapai Rp. 247,61 Triliun dimana penjaminan KUR mencapai 59% sementara penjaminan PEN sebesar 7% dan penjaminan Non KUR sebesar 34%.

6. Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Selatan, total penjaminan KUR mencapai Rp. 12.658 Miliar
7. Di tahun 2021, Jamkrindo telah melakukan realisasi penjaminan kredit program PEN di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 371 Miliar.
8. Jamkrindo sebagai lembaga pelaksana penjaminan sistem Resi Gudang sampai saat ini belum terealisasi karena sesuai dengan PP No.1 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2 “Untuk pertama kalinya sumber pendanaan Lembaga Pelaksana untuk kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang berasal dari APBN sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri”. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum ada PMN terkait dengan penjaminan sistem Resi Gudang tersebut sehingga belum ada bentuk penjaminan Sistem Resi Gudang yang dilakukan oleh Jamkrindo.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. antara lain:

1. Perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah pada bulan November 2021 tumbuh di atas rata-rata perbankan nasional.
2. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, Bank Syariah Indonesia dapat menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dengan rincian data sbb :

Indikator	2020	2021	Kenaikan/(Penurunan)
Asset (Rp. Tn)	239.58	265.29	10,73%
Pembiayaan (Rp. Tn)	156.70	171.29	9,32%
Dana Pihak Ketiga (Rp. Tn)	209.91	233.25	11,12%
Laba Bersih (Rp. Tn)	2.19	3.03	38.42%
Zakat (Rp. Tn)	74	102	37,04%
<i>NPF Nett</i>	1,12%	0,87%	(0,25%) <i>membalik</i>

3. Peningkatan pertumbuhan pembiayaan BSI mayoritas dikontribusikan oleh pertumbuhan pembiayaan di sektor Wholesale, Consumer, Gadai dan Mikro.
4. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, BSI juga menyalurkan pembiayaan di sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dengan data per Desember 2021 BSI menyalurkan sebesar Rp. 8.983 Miliar atau naik sebesar 5,97% dibandingkan penyaluran pembiayaan per Desember 2020 yang hanya sebesar Rp. 8.477 Miliar.
5. Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan subsistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.
6. Salah satu upaya perbankan dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan yaitu melalui penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke

petani dan nelayan. Upaya tersebut sejalan dengan program Pemerintah untuk terus mendorong penyaluran KUR ke sektor pertanian melalui peningkatan limit pembiayaan menjadi Rp. 100 Juta, pemberian fasilitas khusus klaster komoditas pertanian serta relaksasi ketentuan KUR.

7. Inovasi tersebut di atas terbukti mampu meningkatkan penyerapan KUR sektor pertanian secara nasional, termasuk di Kalimantan Selatan yang mencapai Rp.1,40 Triliun pada tahun 2021, atau meningkat 259% dari 2016 yang hanya sebesar Rp0,39 Triliun.
8. Perbankan syariah di Kalimantan Selatan memiliki *share* sebesar 1,57 dari total aset industri perbankan Syariah nasional. Untuk *market share* perbankan syariah di Kalimantan Selatan dibandingkan dengan *share* terhadap bank umum sebagai berikut :

Indikator	Jumlah	Share terhadap Bank Umum
Outlet	29	-
Pembiayaan	Rp. 4,96 Triliun	9,53%
DPK	Rp. 7,11 Triliun	11,52%

9. Peran BSI di Kalimantan Selatan dalam perekonomian dan pembangunan melalui penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor. Khusus UMKM, BSI Kalimantan Selatan telah memiliki total 2.325 nasabah dengan protfolio sebesar Rp765 Miliat atau 34,47% dari total portofolio BSI di Kalimantan Selatan.
10. Terkait dengan kontribusi BSI terhadap ketahanan pangan di Kalimantan Selatan, BSI menyalurkan portofolio pembiayaan sebesar Rp3,4 Miliar di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan jumlah nasabah sebanyak 86 nasabah.

B. SESI II

Tanggal Pertemuan	21 Februari 2022
Lokasi	Ballroom, Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin Kalimantan Selatan
Pimpinan Rapat	Gde Sumarjaya Linggih (Pimpinan Komisi VI DPR RI)
Mitra yang Hadir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama PT Sucofindo, Bapak Mas Wigrantoro Roes Setiyadi; 2. Direktur Sumber Daya Manusia PT Sucofindo, Bapak Johannes Nanang Marjianto; 3. Direktur Keuangan Perum Bulog, Bapak Bagya Mulyanto; 4. Direktur Produksi dan Pengembangan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) holding, Bapak Mahmudi;

	5. Direktur PT Perkebunan Nusantara XIII, Bapak Rizal H. Damanik;
Tema	Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional

Dalam pertemuan, beberapa mitra kerja menyampaikan beberapa hal terkait dengan kontribusi terhadap sektor pangan nasional yang terinci sebagai berikut.

PT Sucofindo

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Sucofindo antara lain:

1. Sucofindo merupakan anak usaha BUMN (Survey ID) yang bergerak dibidang beberapa jasa antara lain
 - a. Inspeksi
 - b. Pengujian
 - c. Sertifikasi
 - d. Konsultasi, dan
 - e. Pelatihan

2. Beberapa kondisi Sucofindo antara lain sbb:

Sumber Daya Manusia	3.500
Jumlah Layanan	168
Pelanggan	12.000
Titik Layanan	66 Cabang dan UP 75 lab

3. Beberapa highlight kinerja keuangan Sucofindo antara lain :
 - a. Pendapatan operasional tahun 2021 mencapai Rp. 2,7 Triliun.
 - b. Rasio pertumbuhan rata-rata pendapatan operasional dari tahun 2016 mencapai 7.5%.
 - c. Laba setelah pajak tahun 2021 sebesar Rp 212,7 Miliar
 - d. Rasio pertumbuhan rata-rata laba setelah pajak dari tahun 2016 sebesar 8,8%.
 - e. Pembayaran dividen tahun 2021 sebesar Rp 32,7 Miliar.
 - f. Total aset tahun 2021 sebesar Rp 3,9 Triliun.
 - g. Rasio pertumbuhan rata-rata total aset dari tahun 2016 sebesar 7,3%.
 - h. Total ekuitas tahun 2021 sebesar Rp. 2,9 Triliun.
 - i. Rasio pertumbuhan rata-rata total ekuitas dari tahun 2016 sebesar 6,9%.
4. Terkait dengan pelaksanaan sistem resi gudang, Sucofindo memiliki peranan sebagai berikut :
 - a. Lembaga Penilai Kesesuaian atas gudang dalam sistem resi gudang melalui SK Bappebti No. 02/Bappebti/KP-SRG/XI/2007 tanggal 26 November 2007.
 - b. Lembaga Penilai Kesesuaian untuk sertifikasi manajemen mutu dalam sistem resi gudang melalui SK Bappebti No. 02/Bappebti/Kep-SRG/SP/LPK/2/2008 tanggal 12 Februari 2008.

- c. Lembaga Penilai Kesesuaian untuk pengujian mutu barang yang disimpan di gudang dalam sistem resi gudang.
 - d. Pengelola gudang berdasarkan SK Bappebti No. 17/Bappebti/KP-SRG/SP/PG/2008 tanggal 19 Juni 2008.
5. Permasalahan pelaksanaan Sistem Resi Gudang antara lain :
- a. Keterbatasan gudang yang memenuhi persyaratan SNI dalam ketentuan pelaksanaan SRG.
 - b. Mutu barang yang disimpan di gudang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan SRG.
 - c. Kendala dalam pemasaran barang yang disimpan dalam gudang skema SRG.
 - d. Keterbatasan pemahaman petani atau pemilik barang mengenai SRG.
 - e. Jumlah barang yang disimpan di gudang terkadang tidak memenuhi skala ekonomi dalam penggunaan mekanisme SRG (jumlah barang sedikit).
6. Terkait dengan kendala tersebut di atas, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :
- a. Pendampingan untuk memenuhi persyaratan gudang yang sesuai dengan SNI kepada para pemilik gudang.
 - b. Peningkatan pemahaman tentang Persyaratan Mutu Barang dalam skema Sistem Resi Gudang kepada Petani dan Pemilik Barang.
 - c. Sosialisasi dan pemahaman lebih mendalam tentang skema dan keuntungan dalam melaksanakan SRG kepada Petani dan Pemilik Barang serta Lembaga Keuangan baik bank maupun non bank.

Perum Bulog

Beberapa hal yang disampaikan oleh Perum Bulog antara lain:

1. Ketersediaan stok beras di seluruh gudang Bulog di Indonesia sebesar 914.178 Ton. Pengadaan akan terus dilakukan untuk menjaga stok beras sebesar 1 sd 1,5 juta ton. Pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penjualan sehingga stok terjaga pada rentang yang diamanatkan oleh Pemerintah sehingga realisasi pengadaan tergantung pada kebutuhan penjualan.
2. Posisi stok pangan per 17 Februari 2022 sebagai berikut :

Komoditas	Stok
Beras	914.378 Ton
Daging Kerbau	24 Ton
Daging Sapi	-
Tepung Terigu	279 Ton
Gula Pasir	1.635 Ton
Minyak Goreng	285 kilo Liter

3. Realisasi penggunaan CBP Tahun 2020-2021 secara nasional sebagai berikut:

Keterangan	2020 (Ton)	2021 (Ton)
Bansos	450.000	-
BB PPKM	-	288.000
KPSH	1.026.942	767.839
Bencal	11.873	8.744
Golongan Anggaran	141.173	89.405
Total	1.629.988	1.153.988

4. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, infrastruktur Kanwil Bulog sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Kanwil	1
Kanca	1
KCP	1
Unit Gudang	17 unit
Kapasitas Gudang	38.000 Ton

5. Realisasi penggunaan CBP Tahun 2020-2021 di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Keterangan	2020 (Ton)	2021 (Ton)
Bansos	4.293	-
BB PPKM	-	2.809
KPSH	12.233	3.404
Bencal	401	347
Golongan Anggaran	418	137
Total	17.346	6.698

PT Perkebunan Nusantara XIII

Beberapa hal yang disampaikan oleh PTPN XIII antara lain:

1. Total areal konsesi PTPN XIII di tahun 2021 sebesar 179.527 Hektar dimana sebesar 55%nya adalah areal komoditas kelapa sawit atau sebesar 129.605 Hektar serta 45%nya adalah areal komoditas karet atau sebesar 49.922 Hektar.
2. Selain wilayah perkebunan tersebut, PTPN juga memiliki pabrik pengolahan sawit dan karet sebagai berikut :
 - a. 10 Unit pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 480 Ton TBS/jam.
 - b. 2 Unit pabrik pengolahan karet CRF dengan kapasitas 60 Ton/hari
 - c. 1 Unit pabrik pengolahan karet RSS dengan kapasitas 10 Ton/hari.
3. Jumlah Karyawan PTPN XIII sebanyak 9.268 orang yang tersebar di 3 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

4. Perkembangan Kinerja keuangan PTPN XIII di tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Indikator	2020	2021	Keterangan
Penjualan (Rp. Triliun)	1,23	2,14	Naik
Laba-Rugi (Rp. Triliun)	(0,74)	0,12	Naik
EBITDA (Rp. Triliun)	(0,07)	0,68	Naik

5. PTPN XIII belum dapat menggunakan Sistem Resi Gudang dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
- Produk jadi yang dihasilkan perusahaan tidak dapat disimpan lama.
 - PTPN XIII membutuhkan perputaran persediaan yang cepat dalam hal memenuhi kebutuhan cashflow operasional perusahaan.

III. CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada seluruh mitra pada saat pelaksanaan kunjungan kerja reses ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian mitra (Kementerian/Lembaga) atau BUMN yang diundang dalam pertemuan. Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

A. BAPPEBTI

- Masih banyak ditemukan kendala di lapangan terkait dengan pelaksanaan sistem Resi Gudang. Komisi VI DPR RI meminta Bappebti agar lebih meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- Beberapa Pemerintah Daerah dinilai kurang kooperatif dalam pelaksanaan sistem Resi Gudang khususnya terkait revisi regulasi. Komisi VI DPR RI meminta Bappebti untuk semakin meningkatkan koordinasi dengan para Pemerintah daerah untuk mendukung program implementasi Sistem Resi Gudang.
- Dalam pengadaan gudang untuk pelaksanaan Sistem Resi Gudang, diharapkan agar Bappebti melakukan *survey* secara seksama dengan memperhatikan kemudahan akses dari dan menuju gudang penyimpanan tersebut.
- Di luar pembahasan Sistem Resi Gudang, Komisi VI DPR RI meminta Bappebti untuk segera menyusun dan mengimplementasikan regulasi terkait aset Kripto.

B. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)

- Selain bertugas sebagai pusat registrasi Sistem Resi Gudang, diharapkan PT KBI (Persero) mampu mengambil peran juga dalam registrasi atau Kliring *House* perdagangan aset digital seperti aset Kripto.

C. PT Jamkrindo

1. Mekanisme penjaminan Sistem Resi Gudang belum berjalan sebagaimana mestinya karena kendala Penyertaan Modal Negara. Komisi VI DPR RI meminta PT Jamkrindo untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar mekanisme penjaminan Sistem Resi Gudang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

D. PT Bank Syariah Indonesia

1. PT BSI belum masuk ke pembiayaan Sistem Resi Gudang. Komisi VI DPR RI meminta PT BSI berkoordinasi dengan Bappebti untuk menyiapkan produk-produk pembiayaan Sistem Resi Gudang dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.
2. Komisi VI DPR RI mendorong PT BSI untuk terus berinovasi dan melakukan langkah strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan transaksi berbasis syariah di Indonesia mengingat potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar.

E. PT Sucofindo

1. Komisi VI DPR RI mendorong PT Sucofindo untuk dapat menangkap potensi bisnis terkait sertifikasi battery motor/mobil listrik yang memiliki peluang besar di masa mendatang.
2. Bisnis survey yang dilakukan oleh PT Sucofindo sangat bergantung pada kebijakan dari regulator atau Pemerintah. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI meminta PT Sucofindo untuk semakin meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk meningkatkan peluang/potensi bisnis.

F. Perum Bulog

1. Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog untuk meningkatkan perannya terkait buffer stock kebutuhan pangan pokok khususnya beras dalam rangka mengatasi apabila terjadi kondisi darurat seperti akses impor ditutup serta bencana kekeringan nasional.
2. Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog untuk bersiap menghadapi lonjakan kebutuhan bahan pangan selama bulan puasa dan hari raya Idul Fitri dengan meningkatkan pengadaan stok bahan pangan pokok.

G. PT Perkebunan Nusantara XIII

1. Dibandingkan dengan holding, kinerja PTPN XIII relatif masih rendah. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI mendorong PT PN XIII untuk terus berinovasi dan meningkatkan operasional usahanya dalam rangka mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik.

Keterangan :

Catatan dan rekomendasi tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan pada rapat kerja dengan Kementerian/Lembaga terkait yang menjadi mitra Komisi VI DPR RI.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan pada masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 17 Mei 2022
Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Kalimantan Selatan

TTD.

GDE SUMARJAYA LINGGIH

A-327

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Selatan Beserta Mitra Kerja



Penyerahan Cenderamata Pada Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Selatan



Sesi Tanya Jawab Oleh Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Selatan



Sesi Tanya Jawab Oleh Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Selatan